

Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato

Elsa Qurbatu Sifa; Salsa Asykiya; Vidya Riana Juniza; Mohammad Alvi Pratama.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Sasykiya@gmail.com

ABSTRACT: The Republic is Plato's work made in medieval times, in all his works including the "Republic" Plato's thinking is inseparable from the influence of the views of his teacher, Socrates. Plato's work views the relationship between law and philosophy which is very closely related and complementary. In his book Plato describes law as part of a larger structure that includes ideas of wisdom and justice obtained through philosophical reflection. In his ideal concept, law not only regulates individual behaviour, but also reflects fundamental moral principles such as truth, justice and goodness. Meanwhile, Plato saw philosophy as an attempt to seek truth, wisdom and justice through critical thinking and philosophical reflection. The purpose of this study is to understand Plato's contribution to political and philosophical thought, as well as to explore the complex relationship between philosophy and law in the context of his ideal society, as well as how the relevance of his views can be applied in the context of modern society and law. The research method used is a qualitative method with a philosophical-historical approach. The results of the research in the book "Republic" are on Plato's thoughts that describe the ideal commonwealth led by philosophers or kings in an effort to create a just and harmonious society. These leaders must have a deep understanding of truth, justice and wisdom gained through philosophy. As such, philosophy provides the moral foundation for legal wisdom in an ideal society. This goal is to be achieved by exploring the relationship between the concepts of justice and wisdom. Justice itself becomes the main focus in "The Republic" which is then implemented through the dialog between Socrates as the main character and other philosophical figures.

KEYWORDS: Plato; Philosophy; Justice.

ABSTRAK: Republik merupakan karya Plato yang dibuat pada abad pertengahan, dalam semua karyanya termasuk "Republik" pemikiran Plato tidak terlepas dari pengaruh pandangan gurunya yaitu Socrates. Karya Plato ini memandang hubungan antara hukum dan filsafat yang kaitannya sangat erat dan saling melengkapi. Dalam bukunya Plato menggambarkan hukum sebagai bagian dari struktur yang lebih besar yang mencakup ide-ide kebijaksanaan dan keadilan yang diperoleh melalui refleksi filosofis. Dalam konsep idealnya, hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, akan tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang mendasar seperti kebenaran, keadilan dan kebaikan. Sementara itu, Plato melihat filsafat sebagai usaha untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan melalui pemikiran yang kritis dan refleksi filosofis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi Plato terhadap pemikiran politik dan filosofis, serta untuk mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara filsafat dan hukum dalam konteks masyarakat idealnya, juga bagaimana relevansi pandangannya dapat diterapkan dalam konteks masyarakat dan hukum modern. Metode penelitian yang digunakan metode

kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis. Adapun hasil penelitian dalam buku “Republik” yakni terhadap pemikiran Plato yang menggambarkan tentang persemakmuran ideal yang dipimpin oleh para filsuf atau raja dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Yang mana para pemimpin tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui filsafat. Dengan demikian, filsafat memberikan landasan moral bagi kebijaksanaan hukum dalam masyarakat ideal. Tujuan ini hendak dicapai dengan mengeksplorasi hubungan konsep keadilan dan kebijaksanaan. Keadilan sendiri menjadi fokus utama dalam buku “Republik” yang kemudian di implementasikan melalui dialog antara Socrates sebagai tokoh utama dengan para tokoh filsafat lainnya.

KATA KUNCI: Plato; Filsafat; Keadilan.

I. PENDAHULUAN

Plato dikenal sebagai salah satu trio filsuf besar pada masa Yunani Kuno, diantaranya yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato merupakan seorang penulis philosophical dialogues yang diketahui memiliki sebanyak 39 karya. Salah satu karya yang banyak dikenal ialah buku dialog-nya yang berjudul “Republic”. Buku ini menjelaskan terkait definisi “Keadilan” menurut pandangan Plato sendiri.

Kesejahteraan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, yang dimana persoalan mengenai keadilan pastinya akan menjadi sorotan utama. Dengan tercapainya keadilan akan memberikan jaminan atas segala Hak Asasi Manusia yang nantinya dapat menjadi pilar dalam tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.

Gagasan keadilan menjadi fokus utama Plato dalam filsafatnya. Hal tersebut disebabkan atas ketidakpuasan Plato dengan kondisi yang memburuk di Athena. Kekalahan Athena atas Sparta ini disebabkan adanya sistem demokrasi (Bhandari, bag. 2). Demokrasi Athena berada di ambang kehancuran dan pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian Socrates, Socrates yang merupakan guru yang sangat ia cintai (Bertrand Russel, 2023, hlm. 142).

Pada akhirnya Plato merasa bahwa keadilan merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Athena dari pembusukan dan kehancuran. Daripada sikap amatiran, sikap tidak berguna, dan keegoisan politik yang merajalela di Athena pada zamannya pada khususnya dan di seluruh dunia Yunani pada umumnya (D.R. Bhandari, bag. 2). Dengan itu dapat disimpulkan bahwa Plato menilai, keadilan adalah kunci utama menjadi suatu negara yang ideal yang dimana keadilan juga sebagai prinsip dasar dari masyarakat yang tertib.

Dalam pengertian yang hampir sepadan dengan “hukum”, keadilan menurut Plato digambarkan seperti kita sedang berbicara tentang “sidang pengadilan” terutama pada saat kita berbicara terkait hak kepemilikan yang tak ada sangkut pautnya dengan kesetaraan. Dalam bukunya, Plato mengusulkan bahwa keadilan itu terwujud pada

tindakan membayar hutang. Namun definisi tersebut ditinggalkan karena kurang memadai, tetapi pengertian yang terkandung di dalamnya tetap hadir sampai akhir pembahasan. Definisi tersebut dikhawatirkan terjadinya ketidaksetaraan kekuasaan dan hak istimewa, tanpa harus berarti tak adil. Golongan pemimpin pastinya mendapatkan semua kekuasaan, hal itu karena merekalah anggota masyarakat yang paling bijaksana. Sedangkan maksud dari definisi Plato ialah dimana ketidakadilan hanya terjadi jika ada orang-orang di dalam kelas lainnya yang ternyata lebih bijaksana dibandingkan sejumlah pemimpin. Dengan itulah sebabnya Plato memberi peluang pengangkatan atau penurunan derajat warga negara (Bertrand Russel, 2023, hlm. 154).

Menurut Plato, negara perlu diselenggarakan berdasarkan cara-cara tradisional atau sebagaimana cara yang ia anjurkan demi dapat merealisasikan sejumlah cita-cita etis seutuhnya. Suatu keadilan dapat terwujud bilamana setiap orang dapat menjalankan tugasnya masing-masing, baik ditentukan berdasarkan seleranya sendiri atau berdasarkan keputusan negara sebagaimana bakatnya (Bertrand Russel, 2023, hlm. 155).

Kelahiran Plato terjadi pada awal Perang Peloponnesia antara Athena kuno dan Sparta serta sekutunya. Masing-masing perang tersebut terdiri dari dua fase, yang pertama berlangsung sekitar tahun 460 SM hingga 446 SM. Perang Kedua dari 431 SM hingga 404 SM. Perang ini disebabkan oleh konflik antara Sparta dan Athena, dua kekuatan besar di Yunani, yang keduanya memiliki pengaruh di Yunani (Hakim, 2010, hlm. 62). Plato lahir dengan nama Aristokles, namun ia dijuluki dengan "Plato" atau Platos dalam Bahasa Yunani mengandung makna lebar, karena menurut pelatih senamnya dahulu ia memiliki dahi dan bahu yang lebar, namun seiring dengan berjalannya waktu julukan Plato mulai tersebar dan ia menjadi dikenal oleh banyak orang dengan nama Plato (Rapar. J. H., 1991, hlm. 41).

Plato merupakan seorang bangsawan yang lahir sebagai anak dari seorang ayah bernama Ariston merupakan keturunan raja terakhir Athena, Raja Codorus (1068 SM), dan seorang ibu bernama Perishon

merupakan keturunan Solon, hal tersebut menjadikannya sebagai anggota keluarga bangsawan yang telah memainkan peran penting dalam politik Athena selama beberapa generasi (Schmandt, 2009, hlm. 51). Oleh karena itu, kemungkinan besar Plato tergolong bangsawan dan memiliki koneksi dengan berbagai kepentingan pemerintah.

Pada saat Athena dikalahkan, Plato dapat menghubungkan kekalahan tersebut dengan demokrasi, namun Plato masih sangat muda pada saat itu dan cenderung meremehkan demokrasi karena status sosial dan hubungan keluarganya (Nurhayati Ismi dkk., 2023, hlm. 9). Disamping itu, Plato merupakan seorang penulis yang produktif sepanjang hidupnya, mengekspresikan berbagai ide-idenya secara eksklusif dengan mengajak para filsuf lain berdiskusi dengannya. Contohnya, dalam bukunya *Phaedo*, Plato mengungkapkan teorinya sebagai dialog antara tokoh-tokoh termasuk Socrates, Simmias, dan Cebes, dan narator *Phaedo*.

Plato yang merupakan murid dan teman diskusi Socrates, yang sangat ia cintai dan hormati, tetapi kemudian Socrates dituduh melakukan kejahatan luar biasa dan dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut diyakini dapat menghancurkan moral generasi muda. Setelah kematian Socrates, Plato meninggalkan Athena dan melakukan perjalanan selama 12 tahun mempelajari sains, matematika, dan filsafat. Ketika Plato berumur 40 tahun, dia melakukan perjalanan ke Italia dan Sisilia untuk mempelajari ajaran Pythagoras. Plato kemudian kembali ke Athena dan pada tahun 387 SM mendirikan sekolah atau Akademi pertama di dunia, sebuah institusi formal yang didedikasikan untuk studi filsafat, matematika, dan sains, didirikan pada 400 SM, dan Plato menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam pengabdian. Kemudian, Plato diketahui telah meninggal dunia pada tahun 347 SM atau lebih tepatnya pada saat ia berusia 80 tahun (Andariati Leni, 2020, hlm. 103)

Dalam semasa hidupnya Plato memiliki sebanyak 39 karya (yakni 26 dialog yang diakui secara umum dan 13 surat yang diragukan), diantaranya:

1. Apology

Apology adalah dialog klasik Plato yang menceritakan pembelaan diri Socrates di hadapan pengadilan Athena. Socrates diadili atas tuduhannya bahwa dia merusak para pemuda Athena, dan bahwa dia memperkenalkan dewa-dewa baru. Ia mengatakan bahwa “Jika ia telah merusak generasi muda, ia pasti telah merusaknya tanpa disengaja” (Plato, 1999).

2. Charmides

Charmides adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dan Charmides serta kerabat Plato yaitu Critias. Dalam dialog ini Charmides mengangkat topik terkait sophrosune. Socrates berdiskusi tentang arti pengetahuan dalam mencapai Kebajikan (Plato, 2008).

3. Crito

Crito adalah dialog Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dan sahabatnya Crito. Setelah Socrates di jatuhkan hukuman mati dalam “Apology” Crito berusaha meyakinkan Socrates untuk melarikan diri dari penjara dan menyelamatkan diri. Namun Socrates menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum (Plato, 1999).

4. Cratylus

Cratylus pertama kali diterbitkan pada Sabtu 6 Mei 2023. Cratylus adalah dialog karya Plato yang membahas tentang kebenaran sebuah nama. Cratylus adalah seorang filsuf yang dikenal sebagai pendukung radikal klaim Heraclitean bahwa segala sesuatu akan terus berubah. Dalam dialog ini, Socrates berdebat dengan Cratylus dan Hermogenes tentang perbedaan pandangan konvensionalis terhadap kebenaran nama (Plato, 2023).

5. Euthydemus

Euthydemus adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dan dua saudara yaitu Euthydemus dan Dionysodorus, yang dikenal sebagai guru keliling yang memiliki banyak kesamaan dengan kaum Sophist (Plato, 2008).

6. Euthyphro

Euthyphro adalah salah satu dialog klasik karya Plato. Euthyphro adalah orang yang terkenal dalam masalah agama, namanya memiliki arti “Pemikir Lurus.” Dalam dialog ini Euthyphro memperkenalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang sifat kebenaran, keadilan dan moralitas yang menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara agama dengan filsafat (Plato, 1999).

7. Gorgias

Gorgias adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dan Gorgias seorang Sophist terkenal serta muridnya Polus dan seorang Politisi terkenal bernama Calicles. Dalam dialog ini, mereka berdiskusi tentang kekuatan retorika dan keadilan, serta sifat kebahagiaan dan kebajikan (Plato, 1999).

8. Hippias Major

Hippias Major adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dan Hippias yaitu seorang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam dialog ini Socrates menantang Hippias untuk mendefinisikan konsep kebenaran, khususnya dalam konteks kebajikan (Plato, 2005b, Bab 16).

9. Hippias Minor

Hippias Minor adalah salah satu karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dengan Hippias.

Dalam dialog ini, Socrates bertanya kepada Hippias tentang pertanyaan “apakah lebih baik melakukan kesalahan secara sukarela atau karena ketidaktahuan” (Plato, 2005, Bab 18).

10. Ion

Ion adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan percakapan antara Socrates dengan seorang Rhapsode bernama Ion. Rhapsode adalah seorang penyair atau pencerita yang terampil dalam menyampaikan karya-karya sastra, serta puisi secara lisan di depan publik. Dalam dialog ini Socrates mempertanyakan kepada Ion tentang keahliannya dalam menyampaikan puisi-puisi Homer. Kemudian, dia mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan Ion dalam karya-karya sastra tersebut (Plato, 2008).

11. Laches

Laches merupakan salah satu dialog karya Plato yang membahas tentang keberanian dan kebijakan. Dalam dialog ini, Socrates berdialog dengan dua Jenderal Athena yaitu Laches dan Nicias mengenai sifat keberanian dan apakah keberanian dapat diajarkan (Plato, 2008).

12. Lysis

Lysis adalah dialog karya Plato yang mengeksplorasi konsep persahabatan dan cinta. Dalam dialog ini, Socrates berdialog dengan dua pemuda, Lysis dan Menexenus, serta teman mereka yang bernama Hippothales. Mereka membahas mengenai sifat persahabatan dan cinta, serta apakah persahabatan harus disertai dengan keinginan untuk kebaikan teman (Plato, 2008).

13. Menexenus

Menexenus adalah salah satu dialog karya Plato, dalam dialog ini Socrates bertemu dengan Menexenus seorang pemuda Athena. Dalam dialog tersebut mereka mendengarkan seorang

pencerita yang menyampaikan pidato pemakaman yang diucapkan oleh Aspasia seorang Perempuan terkenal di Athena. Pidato tersebut mengeksplorasi tentang sejarah Athena (Plato, 2008).

14. Meno

Meno adalah salah satu dialog karya Plato yang membahas tentang konsep pengetahuan. Dalam dialog ini, Socrates berdialog dengan Meno, yaitu seorang aristocrat tentang pertanyaan apakah kebajikan dapat diajarkan (Plato, 2008).

15. Phaedo

Phaedo adalah salah satu dialog karya Plato yang menggambarkan tentang percakapan terakhir Socrates sebelum ia dieksekusi di penjara Athena. Dialog ini merupakan episode terakhir dari rangkaian dialog yang menceritakan rangkaian persidangan dan kematian Socrates (Plato, 2008).

16. Protagoras

Protagoras pertama kali diterbitkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020. Protagoras sendiri adalah salah satu sophist paling penting dan memberikan pengaruh besar dalam pemikiran intelektual pada abad kelima. Protagoras merupakan salah satu dialog Plato yang menggali konsep keadilan dan Kebajikan (Plato, 2020).

17. Symposium

Symposium adalah satu dialog karya Plato yang menggambarkan acara pesta minum di rumah Agathon. Dalam pesta ini dihadiri oleh beberapa tokoh terkemuka yaitu Socrates, Aristophanes dan Alcibiades, mereka berkumpul untuk berdiskusi tentang cinta (eros) (Plato, 2008).

18. Republic

Republik adalah salah satu karya filosofis klasik yang menjelaskan pandangan Plato terhadap keadilan. Karakter utama dalam dialog ini yaitu Socrates dan sejumlah tokoh lainnya termasuk Glaucon dan Adeimantus. Dalam buku “Republik” Plato merumuskan gagasannya tentang negara yang ideal, yang dipimpin seorang filsuf raja yang bijaksana dan diatur oleh prinsip keadilan (Plato, 2018).

19. Phaedrus

Phaedrus adalah salah satu dialog karya Plato yang mengeksplorasi mengenai konsep cinta dan retorika. Dalam dialog ini, Socrates berdialog dengan Phaedrus, seorang aristocrat muda di luar kota Athena. Mereka membahas berbagai topik termasuk cinta, keindahan dan kekuatan kata-kata (Plato, 2008).

20. Parmenides

Parmenides pertama kali diterbitkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2007 yang kemudian direvisi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020. Parmenides merupakan salah satu dialog karya Plato yang menceritakan percakapan antara Socrates dan Parmenides. Dialog ini terdiri dari pemeriksaan kritis terhadap teori bentuk, seperangkat doktrin metafisik dan epistemologis yang diartikulasikan dan di pertahankan oleh karakter Socrates dalam dialog-dialog periode pertengahan Plato (Plato, 2007).

21. Theaetetus

Theaetetus adalah salah satu dialog karya Plato yang mengeksplorasi konsep pengetahuan. Dalam dialog ini Socrates berdialog dengan Theaetetus, yaitu seorang pemuda yang cerdas dan berbakat, serta seorang matematikawan bernama Teodorus. Mereka membahas pernyataan tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana seseorang dapat mengetahui sesuatu (Plato, 2005).

22. Sophist Statesman

Shophist Statesman pertama kali diterbitkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 yang kemudian direvisi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. Statesman atau Sophist Statesman adalah dua dialog Plato yang berfokus pada pertanyaan tentang pemerintahan dan filsafat politik (Plato, 2005).

23. Philebus

Philebus adalah salah satu dialog karya Plato mengenai percakapan antara Socrates dan Philebus tentang apa yang sebenarnya membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Mereka berdiskusi tentang hubungan antara kesenangan dan kebijaksanaan (Plato, 2008).

24. Timaeus Critias

Timaeus merupakan salah satu dialog karya Plato yang pertama kali diterbitkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2005 yang kemudian telah di revisi pada hari Jumat 13 Mei 2022. Timaeus adalah dialog filsafat klasik yang menggambarkan percakapan antara Socrates, Timaeus, Critias, dan Hermocrates. Dalam dialog ini Timaeus menceritakan kisah kosmologi, filsafat alam dan gagasan tentang demiurge, yang merupakan pencipta alam semesta. Menurut Plato alam semesta adalah produk dari tindakan yang rasional, mempunyai tujuan, dan dermawan. Sementara itu Critias menceritakan tentang perang Athena kuno dan Atlantis (Plato, 2005).

25. Laws

Laws adalah karya terakhir Plato yang membahas tentang hukum, pemerintahan dan moralitas. Dialog tersebut adalah percakapan tentang filsafat politik antara seorang Athenian, seorang Kretan, dan seorang Spartan. Dalam karyanya Plato menggambarkan gagasan tentang bagaimana negara harus diatur dan seharusnya diatur berdasarkan hukum yang adil dan rasional (Plato, 2008).

Filsafat memiliki keselarasan dengan hukum, keduanya saling berkaitan. Sebagaimana tujuannya, filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, juga dapat membantu dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum positif (Handayani dkk., 2018, hlm. 724). Sebagaimana gambaran dalam buku “Republik” karyanya Plato, disana para penulis dapat mengambil nilai-nilai yang tertuang dari adanya mempelajari makna “keadilan” dari salah satu tokoh filsuf terkenal itu.

Keadilan kerap kali menjadi topik utama dan menarik dalam persoalan hukum. Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi tanpa sejalanannya dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam suatu kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan atau diputuskan dengan adil karena adanya campur tangan politik. Sehingga menyebabkan kebenaran dan keadilan termanipulasi dan akhirnya peradilan tidak memberikan putusan adil karna tidak melalui prosedur yang tepat (Handayani dkk., 2018, hlm. 720). Seringnya terjadi persoalan tersebut sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang menilai bahwa hukum itu tidak adil.

Gambarannya dalam buku “Republik” dimana Plato mengatakan bahwa pemerintah perlu mengorbankan hidupnya untuk negara dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Dengan itu dapat dikatakan sebagai negara yang ideal, dimana negara perlu memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, agar kebahagiaan dalam hidup itu dapat terwujud pada semua golongan. Hukum juga dibuat bukan atas dasar keserakahan atau atas kepentingan pribadinya, hukum dipergunakan untuk seluruh kepentingan masyarakat yang ada. Adanya gambaran negara yang ideal menurut Plato ini dapat kita pelajari dan sesuaikan dengan masa kini. Dimana pada dasarnya suatu negara yang ideal juga didapati dari jalannya pemerintahan yang baik. Dengan itu apa yang disampaikan Plato terkait konsep dari negara yang ideal itu merupakan bagian yang penting juga untuk kita pelajari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2013, hlm. 8). Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013, hlm. 9).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang menekankan pada persoalan sejarah-sejarah guna mengkaji biografi dan peran dari ahli filsafat yang para penulis fokuskan yaitu Plato. Selain daripada itu para penulis dalam penyusunannya ini diperlukan pendekatan filosofis guna dapat persoalan-persoalan yang mendasar dari falsafah nilai ajaran Plato yang lebih mendorong pada pencarian suatu hakikat. Maka dari itu dalam penelitian ini para penulis akan lebih menekankan pada pencarian suatu hakikat keadilan dari pandangan filsafat dan hukum menurut Plato dalam bukunya yang berjudul "Republic".

Jenis pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dan mencari sumber terpercaya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli, 2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan dalam Buku Republik

Buku Republik merupakan salah satu dialog klasik karya Plato yang mendalami filsafat politik, keadilan, dan moralitas. Dialog ini

menggambarkan sebuah negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf yang bijaksana. Dialog ini mengeksplorasi hubungan antara keadilan dan kebahagiaan. Di dalam buku Republik, Plato mengkritik sistem demokrasi Athena dan menganggap bahwa negara ideal adalah negara yang diatur oleh para filsuf (Plato, 2018, hlm. 371). Menurutnya konsep negara ideal yang dimaksud adalah negara yang dipenuhi dengan kebajikan dan keadilan dimana negara ideal ini terdiri dari tiga kelas sosial seperti penguasa, prajurit dan pengusaha (Bije, t.t., hlm. 6).

Konsep keadilan yang dikaji dalam buku yang berjudul Republik, melalui dialognya antara Socrates dan beberapa tokoh lainnya termasuk Glaucon dan Thrasymachus yang masing-masing diantara mereka mendiskusikan dan mendefinisikan pandangan-pandangan umum tentang keadilan menurut versi mereka sendiri melalui percakapan dengan Socrates (Plato, 2018, hlm. 8). Kemudian dalam buku ini membahas isu-isu terkait pendidikan dan struktur masyarakat yang diajarkan oleh Socrates kepada para karakter dalam dialog. Selajutnya dalam dialog antara Socrates dan para tokoh republik lainnya mendiskusikan mengenai struktur masyarakat ideal dan negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf (Plato, 2018, hlm. 351).

Dalam buku ini juga Plato mengeksplorasi konsep tentang kota ideal yang diilustrasikan melalui gambaran tentang perjalanan jiwa menuju kebenaran dan keadilan, serta mengeksplorasi hubungan anatar keadilan individual dan keadilan sosial dengan menggunakan konsep imitasi, seni, kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah (Plato, 2018, hlm. 71).

Dikenalnya suatu metode penyelidikan filsafat yang digunakan oleh Socrates guna menemukan dan membuktikan adanya kebenaran yang objektif yang dimana hal itu merupakan esensi dari dalam suatu definisi. Metode tersebut dinamakan dialektika, yang penggunaannya dilakukan dengan cara tanya-jawab atau dialog. Menurut Socrates, kebenaran relatif memang ada dan perlu dipegang, namun kebenaran yang objektif juga perlu ada dan perlu diyakini (Umam, 2022, hlm. 65).

Sebenarnya penggunaan metode dialektika ini pertama kali dipraktikkan secara sistematis oleh Zeno yang merupakan murid Parmenides. Hal tersebut dilihat berdasarkan karya dialog Plato yang berjudul Parmenides, dimana dalam bukunya dinyatakan bahwa Zeno mengungguli Sokrates dan begitupun Sokrates yang pada akhirnya mengungguli orang-orang lain. Namun terdapat perbedaan, dimana Sokrates diduga selain daripada mempraktikkan namun dia juga mengembangkan metode tersebut. Hal itu dilihat dari masa kematian Sokrates, dimana ia memberi tanggapan gembira. Menurutnya di dunia berikutnya ia bisa selalu mengajukan pertanyaan dan tidak akan dihukum mati dikarenakan dia akan abadi (Bertrand Russel, 2023, hlm. 124).

Tidak semua persoalan dapat digunakan metode ini, seperti pada ilmu pengetahuan empiris (Bertrand Russel, 2023, hlm. 124). Dengan itu penggunaan metode ini melalui Sokrates menyebabkan banyak orang yang membencinya. Selain daripada itu, terdapat tuduhan terhadap Sokrates atas tindakannya yang meracuni pemikiran anak muda. Anak muda yang mengikuti Sokrates juga dominan merupakan anak-anak bangsawan. Maka dari itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi status quo yang tengah berlangsung, dikhawatirkan bahwa posisi atau kedudukan para anak bangsawan tersebut juga nantinya akan menduduki posisi penting dalam masa pemerintahannya. Ketertarikan anak muda terhadap Sokrates dapat dilihat dari pemikiran Sokrates yang mampu membongkar pikiran sekaligus kelemahan lawan bicaranya (Dian Dwi Jayanto, 2022).

Dalam penggunaan metode ini, Sokrates akan bertanya pada sesama warga, umumnya Sokrates menerapkan metode tersebut pada konsep-konsep seperti keutamaan kesalehan, kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Biasanya Sokrates sendiri itu mengaku tidak tahu apa-apa mengenai hal yang dia pertanyakan. Namun sebenarnya, hal tersebut dilakukan atas suatu alasan, dimana menurutnya bahwa kesadarannya akan ketidaktahuannya akan membuatnya lebih bijaksana dibandingkan mereka yang, meski bodoh, tetap mengaku berpengetahuan (“Metode Sokrates,” 2024).

Penggunaan metode Sokrates ini dilakukan dalam bentuk dialog argumentatif antar individu, yang dimana melalui pertanyaan juga argumentasinya Sokrates akan mencapai suatu kebenaran yang salah satunya mendasari konsep suatu keadilan. Pada dasarnya penggunaan metode ini tepatnya pada persoalan yang tentangnya kita telah cukup pengetahuan untuk mencapai kesimpulan yang benar, namun kita memang tidak mampu untuk memanfaatkan pengetahuan itu secara benar-benar logis karena cara berpikir kita yang rancu atau memang karena lemahnya analisis (Bertrand Russel, 2023, hlm. 125).

Selanjutnya mengenai Plato yang menyampaikan beberapa gagasan pentingnya terkait filsafat yang terdiri dari, pertama merupakan tema paling awal dari rangkaian panjang pemikirannya ialah gagasannya tentang Utopia. Lalu yang kedua teorinya tentang ide-ide, merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini masih belum terselesaikan. Dan yang ketiga, pendapatnya mendukung imortalitas, keempat pandangan terkait kosmogoni, dan yang terakhir yaitu konsepnya tentang pengetahuan yang lebih bersumber pada ingatan daripada persepsi (Bertrand Russel, 2023, hlm. 141).

Seluruh ide dan gagasan Plato tersebut dituliskan dalam salah satu karya dialognya yang berjudul "Republic". Dan filsafat Plato memuncak pada saat gagasannya mengenai Negara (Bije, t.t., para. 3). Dalam gagasannya yang pertama, yakni terkait Plato dan Negara Utopia-nya lebih mengarah pada pembentukan negara persemakmuran ideal (Bertrand Russel, 2023, hlm. 146). Dimana menurutnya ciri dari negara yang baik dan ideal ialah suatu negara yang memiliki ciri adanya sebuah keadilan (Andariati Leni, 2020, hlm. 100). Dalam ajarannya, suatu negara timbul atas kebutuhan dan keinginan manusia, yang membuat mereka perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Sebagaimana kecakapan setiap orang berbeda-beda maka tiap-tiap orang memiliki tugasnya sendiri, dan mereka bekerja sama untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dengan adanya suatu kesatuan inilah dapat dikatakan sebagai masyarakat dan Negara (Bije, t.t., para. 3). Adanya suatu hakikat negara tersebut perlu diimbangi juga dengan

kesejahteraan masyarakatnya, dimana masyarakat perlu diberikan hak-haknya sembari mereka memenuhi kewajibannya sebagai warga negara (Syahrin dkk., 2020, hlm. 187). Lantas kembali lagi pada unsur keadilan yang perlu dipenuhi dalam ciri-ciri sebagai suatu negara yang ideal.

Sebagai murid dari Socrates, Plato mengemukakan pendapat Socrates mengenai konsep keadilan. Socrates sendiri memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai definisi dari keadilan itu sendiri, namun dengan berargumentasi dengan dua saudara laki-laki Plato membuat Socrates membuat definisi sederhana mengenai Keadilan. Dua saudara laki-laki Plato mengemukakan gagasannya dengan menggambarkan legenda Gyges yang merupakan legenda tentang penemuan sebuah cincin yang disebut dengan cincin Gyges, dan bagi orang yang menemukan cincin tersebut maka akan diberikan kekuatan untuk menjadi tidak terlihat (Plato, 2018, hlm. 60). Dua saudara laki-laki Plato memaknai cerita tersebut dan menghubungkan dengan makna keadilan bahwa tidak ada seorang pun yang akan berbuat adil apabila ia memiliki kesempatan untuk melakukan ketidakadilan tanpa mendapat hukuman dan bahwa orang yang adil maupun yang tidak adil akan melakukan hal yang sama apabila mereka memiliki kekuatan untuk lolos dari ketidakadilan dan bebas dari hukuman. Manusia hanya memiliki alasan satu-satunya untuk bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan yaitu karena takut dihukum karena ketidakadilan.

Kemudian Socrates memberikan argumentasinya bahwa daripada melihat konsep keadilan di dalam jiwa manusia lebih baik melihat konsep keadilan dalam suatu kota atau negara ideal, karena keadilan tidaklah bersifat pribadi, melainkan dalam skala yang lebih besar seperti di suatu negara maupun kota (Plato, 2018, hlm. 71). Socrates tidak pernah menyatakan konsep keadilan secara menyeluruh, namun Socrates hanya mendefinisikan keadilan kepada kondisi kota dan negara idela yang ia gambarkan dengan kondisi kota dan negara yang tampak adil dan kondisi tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam suatu negara ideal maupun kota, keadilan harus tercipta sampai manusia meyakini bahwa mereka dilahirkan dari bumi dan memiliki takdir dalam diri mereka, yang artinya bahwa keadilan harus menjadi

penyebab atas kondisi dan keberadaan mereka. Selain itu, keadilan harus menopang dan menyempurnakan tiga kebajikan utama lainnya seperti temperance, kebijaksanaan, dan keberanian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari definisi keadilan menurut Socrates bahwa keadilan itu sebagai mengerjakan atau melakukan sesuatu hal yang secara alami paling cocok bagi dirinya dan melakukan urusannya sendiri dengan tidak menjadi orang yang suka ikut campur keadilan pun sebagai penyebab dan kondisi keberadaan mereka. Socrates tidak memasukkan keadilan sebagai suatu kebajikan di dalam kota, menyatakan bahwa keadilan pun tidak ada dalam jiwa manusia, melainkan merupakan hasil dari jiwa yang tertata dengan baik.

Namun, akibat dari konsep keadilan tersebut, manusia terbagi menjadi tiga golongan yaitu Rakyat Biasa, Kaum Serdadu, dan Pemimpin.

1. Rakyat Biasa (Golongan Pengusaha)

Golongan ini biasa terdiri dari para pekerja atau petani-petani dan tukang-tukang yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu Negara.

2. Kaum Serdadu (Golongan Prajurit)

Golongan ini memiliki tugas dalam menjaga keselamatan suatu negara, dimana mereka perlu mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya tersebut.

3. Pemimpin (Golongan Penguasa)

Golongan ini merupakan golongan yang memiliki kekuasaan politik, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari kedua golongan diatas. Golongan ini juga terdiri atas orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat (Bije, t.t., hlm. 6).

B. Negara Ideal Menurut Plato

Apabila seorang penguasa dapat menciptakan hukum yang adil, dan apabila kaum serdadu dapat melaksanakan perintah penguasa, dan apabila para pengusaha dapat menaati otoritasnya, maka suatu masyarakat akan menjadi adil. Dengan demikian dapat diartikan bahwa keadilan akan tercipta apabila masyarakat sudah dapat melihat dan merasakan bahwa pihak pengusaha, prajurit, dan penguasa sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Surajiyo, t.t., hlm. 268). Dengan demikian, dalam suatu negara diperlukan para penguasa yang mampu bersikap adil, mensejahterakan rakyatnya, dan dapat menciptakan negara ideal, Socrates pun menyebutkan bahwa yang pantas menjadi seorang penguasa di suatu negara yaitu adalah para raja filsuf (Plato, 2018, hlm. 202).

Di dalam negara atau kota yang ideal, harus di pimpin oleh seorang raja filsuf yang cerdas, dapat diandalkan, dan bersedia untuk menjalani hidup sederhana, sehingga dapat memfasilitasi kerja sama yang harmonis dari semua warga dan pemerintahan negara. Namun, kualitas-kualitas tersebut sangat jarang terwujud dengan sendirinya, sehingga kualitas-kualitas ini harus didorong melalui pendidikan dan studi tentang kebaikan atau dapat pula disebut dengan Alegori Gua. Alegoria Gua disebut sebagai pendidikan yang menggambarkan cara pembelajaran melibatkan perolehan perspektif baru, melihat hal-hal dan peristiwa sehari-hari dari sudut pandang baru. Setiap orang mampu mendapatkan pendidikan dalam pengertian ini. Namun tidak semua orang mampu keluar dari Gua menuju dunia dalam bentuk yang dapat dipahami.

Plato menggunakan Alegoria Gua untuk menggambarkan perjalanan seorang filsuf dari ketidaktahuan menuju pencerahan mengenai permasalahan yang memiliki sifat universal. Dalam Alegoria Gua terdapat analogi matahari dan Garis Pemisah. Dalam analogi ini, matahari dilambangkan sebagai makna kebaikan (McAleer, 2020, hlm. 194–195). Inilah objek utama ilmu filosof. Kebaikan dapat dianggap sebagai wujud dari Bentuk, atau penataan dunia secara keseluruhan.

Tahapan pemahaman awal hanya berkorelasi dengan tingkatan pada garis pemisah yang dibayangkan. Garis tersebut terbagi menjadi dunia yang terlihat dan dunia yang dapat dipahami, dan matahari sebagai pembatasnya (McAleer, 2020, hlm. 196).

Untuk mempermudah, dalam buku Republik menggambarkan para filsuf disamakan dengan seorang tahanan yang dibebaskan dari gua. Tahanan awalnya dibutakan oleh cahaya, tetapi ketika ia menyesuaikan dengan kecerahannya, ia melihat api dan patung-patung serta bagaimana hal tersebut menyebabkan gambaran yang disaksikan di dalam gua. Ia melihat bahwa api dan patung di dalam gua hanyalah salinan dari benda aslinya dan apa yang kita lihat sehari-hari hanyalah penampakan atau refleksi dari bentuk (Plato, 2018, hlm. 307). Akan tetapi, para filsuf tersebut tidak akan tertipu oleh bayang-bayang dan karenanya akan mampu melihat dunia yang nyata (dunia di atas dunia yang tampak), para filsuf akan berusaha untuk memperoleh pengetahuan tentang segala sesuatu dalam dirinya. Bayangan yang disaksikan di dalam gua tersebut berkorelasi dengan tingkat terendah dalam garis Plato, yaitu imajinasi dan dugaan.

Setelah dibebaskan dan melihat bayangan secara nyata dan apa adanya, ia mencapai tahap kedua pada garis yang terbagi yaitu tahap keyakinan, karena hal tersebut membuat para filsuf percaya dan meyakini bahwa patung-patung di dalam gua tersebut nyata adanya, dan hal tersebut berkorelasi dengan tahap ketiga dalam pemikiran Plato yaitu tahanan (para filsuf) beralih ke matahari yang digenggamnya sebagai bentuk kebaikan, dan tahap terakhir ini disebut pula dengan dialektika yang merupakan tahapan tertinggi yang mungkin terjadi, yang artinya bahwa tahanan tersebut merupakan sebagai akibat dari bentuk kebaikan dan dapat memahami seluruh bentuk lainnya dalam kenyataan.

Pemikiran Plato terhadap negara yang ideal adalah negara yang menganut prinsip kebajikan (virtue). Dalam hal ini Kebajikan yang dimaksud ialah pengetahuan (Fadilah, 2020). Seperti apa yang dijelaskan dalam buku Republik, menurut Plato pemimpin yang baik ialah para filsuf. Plato yang merasa tidak puas dengan para penguasa

yang tidak memiliki pengetahuan dan moral untuk bertindak demi kebaikan bersama. Artinya para penguasa terobsesi pada kepentingan pribadi. Sedangkan menurutnya negara harus diperintah oleh para filsuf yang pastinya memiliki jejak pendidikan bahkan merupakan pencinta kebijaksanaan (Ludert, 2017). Bahkan mereka bukanlah seseorang yang menginginkan kekuasaan demi kekuasaan. Mereka siap untuk membuat undang-undang yang adil dan dapat mengatur negaranya dengan bijaksana. Dengan itu adanya keselarasan antara hukum dengan filsafat, sebagaimana penggambaran yang disebutkan dalam buku Republik. Dalam suatu pelaksanaan hukum perlu diiringinya filsafat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa para filsuf yang perlunya dikategorikan sebagai golongan pemerintah itu merupakan orang yang paling cakap, bahkan mereka telah menempuh pendidikan dan pelatihan spesial. Mereka melakukan tugas dalam membuat undang-undang dan juga mengawasi pelaksanaannya (Kristiawan, 2016, hlm. 218).

Hukum merupakan penalaran yang benar, namun menurut Socrates bukan hanya mengenai penalaran saja yang baik tetapi juga tentang insight atau ilham sebagaimana wawasan menurut Socrates, artinya percuma kita punya akal yang sehat dan penalaran yang baik kalau wawancara dan pengalaman kita kurang (Pratama, 2024, hlm. 10).

Sehubungan dengan konsep negara dan kota ideal, terdapat sistem negara yang dinilai dapat meruntuhkan rasa keadilan, seperti Kota Timokrasi yang tidak menunjukkan rasa keadilan, karena mereka diperintah oleh elemen semangat cinta kehormatan. Konsep keadilan, yang kita ketahui yaitu dengan melakukan pekerjaan sendiri dan tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya, namun berbeda dengan negara timokrasi mereka yang melakukan pekerjaan mereka disebut bodoh dan dianggap rendah, sedangkan mereka yang mencampuri urusan orang lain dihormati dan dipuji (McAleer, 2020, hlm. 232). Semangat kehormatan memanglah merupakan suatu hal yang baik, karena dapat mengantarkan seseorang memiliki jiwa yang halus, mulia, dan indah, sehingga pantas untuk dihormati. Hal tersebut dapat

dianggap sebagai faksimili kebajikan, karena memberikan motif yang lebih mulia daripada kepentingan pribadi. Namun disamping itu, kehormatan sebagai kebaikan internal dapat dengan mudah digantikan oleh kebaikan eksternal berupa rasa hormat, terkhusus dalam budaya kompetitif dan cinta kemenangan. Dihormati seharusnya hanya merupakan konsekuensi yang dapat diduga dari tindakan yang baik, namun justru menjadi hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai.

Dengan adanya perubahan dalam bidang pendidikan dan perubahan nilai, menjadi bagian dari alasan seiring merosotnya Timokrasi menjadi Oligarki. Perubahan paling penting yaitu terlihat pada anggapan bahwa kekayaan menggantikan kehormatan sebagai tujuan utama kota dan jiwa manusia, seiring dengan adanya persaingan demi kehormatan yang mendorong orang-orang timokratis menemukan objek baru (McAleer, 2020, hlm. 233–234). Para penguasa melihat rekan-rekannya berusaha keras dan kemudian mengabaikan aturan-aturan yang melarang kepemilikan pribadi dan mereka meniru bahkan bersaing satu sama lain dengan tujuan untuk mengarahkan mereka untuk secara formal menetapkan kekayaan sebagai kualifikasi untuk berkuasa (Plato, 2018, hlm. 358). Oleh karena itu, kekayaan merupakan kriteria paling utama yang mereka gunakan dan mereka cari untuk memilih kepala negara dan menolak untuk mempercayakan jabatan kepala negara tersebut kepada orang miskin meskipun ia dinilai sebagai pemimpin yang baik.

Selanjutnya terdapat sistem hukum Demokrasi yang mengandung ciri khas adanya kebebasan, yang bagi Plato hal tersebut bukanlah hal yang baik. Ia mengartikannya seperti dengan ‘izin untuk melakukan apa yang diinginkan seseorang’ dan ‘mengatur kehidupan seseorang dengan cara sendiri dan dengan cara apa pun yang menyenangkannya’ (Plato, 2018, hlm. 374). Salah satu kritik Plato sebagai bentuk ketidaknyamanan terhadap kebebasan seperti itu adalah bahwa kebebasan tersebut tidak didasarkan pada prinsip rasional apa pun dan bahwa kebebasan tersebut mendasari pilihan berdasarkan keinginan (Plato, 2018, hlm. 385), dan

menurut Plato kebebasan dalam Demokrasi dapat mengakibatkan suatu tindakan ketidakadilan.

Kebebasan dalam Demokrasi, dapat menghasilkan suatu oligarki ephitumia yang artinya bahwa terpilihnya segelintir orang yang dilandari dengan faktor kekayaan untuk memegang kekuasaan dan mereka memiliki tujuan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka (Cusdiawan, 2018). Artinya bahwa, mereka memiliki tujuan untuk mengejar kenikmatan dunia. Sedangkan, menurut Plato pemimpin dalam suatu kota atau negara idela haruslah dipilih berdasarkan pada alasan yang rasional, contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Socrates bahwa seorang pemimpin atau penguasa haruslah seorang raja filsuf yang artinya bahwa orang itu harus memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk memimpin suatu negara yang berkeadilan.

Selain dapat mengarah kepada Oligarki Ephitumia, kebebasan yang diberikan kepada warga negara demokrasi pada akhirnya akan mengarah pada Tirani atau sebagai bentuk pemerintahan yang paling mengalami kemunduran (Plato, 2018, hlm. 386). Kebebasan dalam demokrasi tersebut dapat membagi masyarakat menjadi tiga kelas sosial ekonomi, yaitu diantaranya kelas dominan, kelas elit, dan rakyat jelata. Konflik antara kelas penguasa dan kelas elit dapat mengakibatkan rakyat jelata mencari perlindungan atas kebebasan demokratis yang mereka miliki. Mereka menyalurkan seluruh kekuasaan mereka pada sang Demagog Demokratis mereka, yang pada akhirnya menjadi terkorupsi oleh kekuasaan dan memiliki jiwa tiran dengan pasukan kecil pendukungnya demi perlindungan dan kendali mutlak atas rakyatnya (Plato, 2018, hlm. 403), hal tersebut berbeda dengan raja filsuf yang yang menjunjung tinggi serta mewujudkan kebijaksanaan dan kebajikan.

Menurut Plato, jiwa tiran tidak berbeda jauh dengan kita semua, meskipun ia tidak memiliki pengendalian mendasar dan rasa malu. Dengan tidak adanya batasan, ia mengejar tujuan yang sebenarnya kita semua ingin capai, namun kita menghilangkan keinginan itu karena takut atas konsekuensinya. Namun berbeda halnya dengan orang yang memiliki jiwa tiran, ia akan melakukan berbagai cara untuk

merealisasikan keserakahannya untuk menjadi pemimpin (Plato, 2018, hlm. 398). Orang yang memiliki jiwa tiran tidak hanya jahat, namun juga gila. Dalam kasus yang paling ekstrim, tiran dapat dinilai sebagai ‘binatang buas’ karena tanpa kompetensi normatif, ia tidak mampu mengenali norma-norma moral, dan tidak mampu menyesuaikan perilakunya dengan pengetahuan moral (Nielsen Karen Margrethe, 2019, hlm. 147).

Sebetulnya, tiran dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma moral kapan pun apabila dirasa perlu. Sang tiran muda masih mempertahankan sisa-sisa kompetensi kognitifnya apabila kegilaan atau keserakahannya belum menghilangkan rasa malu dari jiwanya. Pada awal karir politiknya, tindakannya akan sesuai dengan keyakinan normatifnya yaitu, bahwa ia akan mencari kepuasan yang tidak pandang bulu dan maksimal. Namun, dengan segala kecerdikannya dan dengan seluruh kekuatannya, rencana sang tiran akan gagal karena ia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya, karena keserakahannya yang akan menghalangi ia untuk menikmati objek apapun yang diinginkannya.

Plato dalam bukunya yang berjudul “Republik” berpendapat penanaman kebajikan moral dan kebijaksanaan filosofis sangat diperlukan dalam terlaksananya negara yang ideal dan pemerintahan yang baik. Dengan itu warga negara terutama anak-anak perlu dididik dalam mengembangkan kemampuannya, demi terciptanya pemimpin yang bijaksana (Brooks & Payne, t.t.). Selanjutnya menurut Plato bahwa negara perlu mengambil tanggung jawab untuk mendidik warganya demi menghasilkan individu yang berbudi luhur dan dapat memberikan kontribusi bagi kebaikan masyarakat (Nurdin, 2014, hlm. 67). Tujuan dari pendidikan tersebut bukan hanya untuk pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi juga dapat menanamkan nilai-nilai moral pada individu dan juga dapat mendorong pengembangan lainnya.

Banyaknya pendidikan yang diberikan dapat melahirkan pemimpin yang baik sebagaimana prinsip Plato. Plato percaya bahwa pendidikan moral perlu dijalani juga dengan pendidikan teoritis. Dimana

pendidikan teoritis merupakan perolehan pengetahuan dan keterampilan sedangkan pendidikan moral merupakan penanaman dan karakter moral. Penggabungan tersebut dapat menghasilkan individu-individu yang utuh dan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dari suatu pendidikan tersebut, dipercayai bahwa tujuan akhirnya merupakan pengembangan raja filsuf. Raja filsuf merupakan perwujudan dari sistem pendidikan ideal, dimana pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakter moral ditekankan secara merata. Dimana nantinya seorang individu yang telah mencapai tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi, maka dialah paling cocok mengatur masyarakat atau menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik juga merupakan individu yang memiliki kebijaksanaan, hal tersebut dikarenakan diperlukannya kemampuan dalam memimpin pemerintahan dengan bijaksana (Kumare, 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa adanya peran penting dari adanya keterlibatan pendidikan moral terhadap individu, demi tercapainya suatu negara yang ideal dan pemerintah yang baik.

C. Hubungan Keadilan Plato dengan Masa Kini

Buku Republik karya Plato mempertimbangkan filsafat dan hukum dalam konteks secara kompleks yang di implementasikan kedalam dialog antara Socrates dan tokoh karakter lainnya dalam menyelidiki hubungan antara keadilan (Plato, 2018, hlm. 71). Filsafat dijadikan sebagai alat dalam memahami dasar-dasar moral politik yang digunakan untuk menelusuri ide-ide dasar mengenai keadilan, kebenaran dan bentuk pemerintahan yang ideal. Sedangkan hukum sendiri merupakan instrumen dalam mengimplementasikan konsep-konsep tersebut di masyarakat (Andariati Leni, 2020, hlm. 9). Mengingat bahwa pemikiran sekarang sudah sangat berkembang dan sejumlah pemikiran Plato terkesan sudah ketinggalan zaman, akan tetapi terdapat beberapa konsep pemikiran Plato dalam buku Republik yang hingga saat ini masih relevan (Arismunandar, 2008, hlm. 1), karena dalam dialog tersebut Plato cenderung mengadopsi pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti konsep tentang keadilan, kebenaran dan bentuk

pemerintahan yang masih menjadi perhatian dalam filsafat politik dan hukum kontemporer.

Di dalam buku Republik, Plato menunjukkan apa itu keadilan dan mengapa menjadi adil adalah kepentingan terbaik bagi setiap orang (Plato, 2024). Menurutnya, keadilan adalah keadaan dimana setiap bagian dari masyarakat, mulai dari individu hingga kelompok, menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik dan seimbang (Nasution, 2014, hlm. 120). Relevansi hal ini dapat dilihat dalam konteks etika pribadi, tanggung jawab sosial, dan konflik moral yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pemikiran Plato dalam buku Republik masih mejadi topik relevan dalam menyajikan pandangan filosofis yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerintahan serta bagaimana konsep-konsep yang dibahas tersebut dapat di implementasikan kedalam konteks sosial dan politik.

Meskipun konteks dari implementasi tersebut terdapat perbedaan zaman dan waktu yang cukup lampau, akan tetapi prinsip dasarnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Namun, meskipun konsep-konsep tersebut masih relevan, akan tetapi dalam perkembangannya pemikiran Plato mendapatkan beberapa kritik. Karena pemikirannya dianggap cenderung idealis dan terlalu abstrak. Sehingga sulit untuk di implementasikannya kedalam konteks sosial yang kompleks dan beragam (Marleni, 2014, hlm. 4).

IV. KESIMPULAN

Dalam buku Republik berbicara mengenai konsep keadilan dan negara ideal. Disamping itu, apabila dalam skala individu bahwa orang yang adil yaitu orang yang mampu untuk mengendalikan diri dari perasaan hatinya yang dikendalikan oleh akal. Namun, tidak lupa juga bahwa keadilan tidak hanya ada di dalam setiap individu saja, melainkan ada di dalam suatu negara. Keadilan merupakan bentuk kebajikan tertinggi dari suatu negara yang dianggap yang baik atau ideal.

Disamping itu, agar terciptanya suatu negara ideal yang berkeadilan haruslah dipimpin oleh orang yang memiliki kepribadian bijaksana, cerdas, dan dapat diandalkan oleh rakyatnya. Kepribadian-kepribadian seperti itu hanya dimiliki oleh raja filsuf yang telah menempuh pendidikan tentang kebaikan atau Alegori Gua dengan menggunakan analogi matahari dan garis pemisah. Dalam Alegori Gua ini, para filsuf dapat memahami dan mengartikan seluruh bentuk yang mereka lihat dengan matahari sebagai pembatasnya menjadi dalam bentuk yang benar-benar ada, yang diawali dengan adanya imajinasi, dugaan, hingga dapat mempelajari dan memahami sesuatu dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, agar terwujudnya keadilan dan negara ideal haruslah dipimpin oleh seorang raja filsuf yang memiliki wawasan tinggi dan mampu untuk membuat aturan hukum agar terciptanya konsep keadilan di dalam suatu negara, pembentukan hukum tersebut harus di dasari oleh penalaran yang benar dengan memperhatikan norma-norma moral yang ada di dalam masyarakat.

Dalam suatu negara ideal yang berkeadilan, setiap orang diberikan kebebasan untuk menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok bagi dirinya. Hal tersebut berkesesuaian dengan negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan. Namun menurut Plato kebebasan tersebut justru akan menciptakan ketidakadilan baik di lingkungan masyarakat maupun dalam keberlangsungan negara, kebebasan tersebut tidak rasional sehingga orang-orang cenderung akan bersikap dengan semunya dan memerintahkan orang-orang dengan caranya sendiri tanpa memperdulikan dampak atau akibat yang akan ia timbulkan. Kebebasan dalam demokrasi dapat menghasilkan tatanan pemerintahan yang Tirani atau kemunduran dalam tatanan pemerintahan karena akan memunculkan jiwa tiran yang serakah dan 'haus' akan kekuasaan, seseorang yang memiliki jiwa tiran cenderung akan memerintahkan dan membuat aturan hukum secara sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan norma-norma moral yang ada sehingga keadilan tidak ada terealisasikan. Sedangkan, bagi Plato keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan atau substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Namun sebaliknya, apabila suatu negara di pimpin oleh negara rang yang tidak memiliki jiwa tiran yang serakah dan 'haus' akan kekuasaan, seseorang yang memiliki jiwa tiran cenderung akan memerintahkan dan membuat aturan hukum secara sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan norma-norma moral yang ada sehingga keadilan tidak ada terealisasikan. Sedangkan, bagi Plato keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan atau substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya penulisan jurnal kami yang berjudul "Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik" dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan telah selesainya karya penulisan jurnal kami, maka perkenankan kami dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama, S. Fil., M.Phil. selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, dan berbagi ilmu mengenai filsafat selama proses pengerjaan karya jurnal ini dari awal hingga akhir, sehingga karya penulisan jurnal ini terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya sehingga kami dapat menyelesaikan karya penulisan jurnal ini dengan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- Andariati Leni. (2020). Filsafat Politik Plato. *Jurnal Review Politik*, 10(1).
- Arismunandar, S. (2008). *Pemikiran Politik Plato Ditinjau dari Filsafat Politik Demokratis*.
- Bertrand Russel. (2023a). *Sejarah Filsafat Barat: kaitannya dengan kondisi sosio-politik zaman kuno hingga sekarang* (S. Jatmiko, A. Prihantoro, I. Muttaqien, I. Baihaqi, & M. Shodiq, Ed.; Vol. 8). Pustaka Pelajar.
- Bertrand Russel. (2023b). *Sejarah Filsafat Barat: kaitannya dengan kondisi sosio-politik zaman kuno hingga sekarang* (S. Jatmiko, A. Prihantoro, I. Muttaqien, I. Baihaqi, & M. Shodiq, Ed.; Vol. 8). Pustaka Belajar.
- Bertrand Russel. (2023c). *Sejarah Filsafat Barat: kaitannya dengan kondisi sosio-politik zaman kuno hingga sekarang* (S. Jatmiko, A. Prihantoro, I. Muttaqien, I. Baihaqi, & M. Shodiq, Ed.; Vol. 8). Pustaka Belajar.
- Bije, V. (t.t.). *ALIRAN ILMU NEGARA MENURUT PLATO SERTA PERKEMBANGANNYA*.
- Brooks, C., & Payne, W. R. (t.t.). *Greek Philosophy*. Dalam *Introduction to Humanities*. LumenCandela. Diambil 9 Maret 2024, dari https://courses-lumenlearning-com.translate.googleusercontent.com/translate/g/translate?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq#:~:text=One%20of%20the%20key%20points,contributions%20to%20math%20and%20science
- Cusdiawan. (2018, September 10). *Permasalahan Demokrasi, Ditinjau dari Perspektif Filosofis*. BEM Kema Unpad. <https://kema.unpad.ac.id/permasalahan-demokrasi-ditinjau-dari-perspektif-filosofis/>

- Dian Dwi Jayanto. (2022, Juni 5). Socrates, Kematian dan Metode Dialektika. pojokwacana. <https://www.pojokwacana.com/socrates-kematian-dan-metode-dialektika/>
- D.R. Bhandari. (t.t.). Plato's Concept Of Justice: An Analysis. Boston University. Diambil 26 Februari 2024, dari <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciBhan.htm>
- Fadilah, F. N. (2020, Agustus 25). Rangkuman Pemikiran Plato. InMind Institute.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1).
- Hakim, A. (2010). NEGARA DALAM PERSPEKTIF PLATO. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i1.1410>
- Handayani, Johannes, & Kiki. (2018). PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720–725.
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan: The Choice Is Yours* (1 ed.). Penerbit Valia Pustaka Jogjakarta.
- Kumare. (2023). *Plato's Theory of Education: A Powerful Guide*. PoliticaQnA.
- Ludert, J. (2017, Maret 29). What Plato Can Teach Us About Leadership: Part 1 of 2. City University of Seattle. <https://www.cityu.edu/what-plato-can-teach-us-about-leadership-part-1-of-2/>
- Marleni. (2014). Relevansi Filsafat Plato dalam Memahami dan Mengatasi Krisis .
- McAleer, S. (2020). *Plato's Republic: An Introduction*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/obp.0229>

- Metode Sokrates. (2024). Dalam Wikipedia The Free Encyclopedia. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method
- Nasution, J. B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern . 3, 118–130.
- Nielsen Karen Margrethe. (2019). THE TYRANT'S VICE: PLEONEXIA AND LAWLESSNESS IN PLATO'S REPUBLIC. *Philosophical Perspectives*, 33(1), 146–169. <https://doi.org/10.1111/phpe.12129>
- Nurdin, B. (2014). FILSAFAT HUKUM (TOKOH-TOKOH PENTING FILSAFAT: SEJARAH DAN INTISARI PEMIKIRAN) (N. Radinas, Ed.; 1 ed.). PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Nurhayati Ismi, Sa'ari Maya Herma, Firmanulloh Mochammad Deny, & Hermansyah Selpina. (2023). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(9), 9.
- Plato. (1999a). *Apology* (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/files/1656/1656-h/1656-h.htm>
- Plato. (1999b). *Crito* (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg . <https://www.gutenberg.org/cache/epub/1657/pg1657-images.html>
- Plato. (1999c). *Euthyphro* (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/cache/epub/1642/pg1642-images.html>
- Plato. (1999d). *Gorgias* (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg . <https://www.gutenberg.org/files/1672/1672-h/1672-h.htm>
- Plato. (2005a). *Method and Metaphysics in Plato's Sophist and Statesman* . Stanford University . <https://plato.stanford.edu/entries/plato-sophstate/>

- Plato. (2005b). Plato's Shorter Ethical Works . Stanford University .
<https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-shorter/#11>
- Plato. (2005c). Plato's Timaeus . Stanford University .
<https://plato.stanford.edu/entries/plato-timaeus/>
- Plato. (2005d). Plato on Knowledge in the Theaetetus . Stanford University .
<https://plato.stanford.edu/entries/plato-theaetetus/>
- Plato. (2007). Plato's Parmenides . Stanford University.
<https://plato.stanford.edu/entries/plato-parmenides/>
- Plato. (2008a). Charmides (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1580/1580-h/1580-h.htm>
- Plato. (2008b). Euthydemus (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1598/1598-h/1598-h.htm>
- Plato. (2008c). Ion (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1635/1635-h/1635-h.htm>
- Plato. (2008d). Laches (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1584/1584-h/1584-h.htm>
- Plato. (2008e). Laws (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1750/1750-h/1750-h.htm>
- Plato. (2008f). Lysis (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1579/1579-h/1579-h.htm>
- Plato. (2008g). Menexenus (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1682/1682-h/1682-h.htm>
- Plato. (2008h). Meno (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1643/1643-h/1643-h.htm>
- Plato. (2008i). Phaedo (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1658/1658-h/1658-h.htm>

- Plato. (2008j). Phaedrus (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1636/1636-h/1636-h.htm>
- Plato. (2008k). Philebus (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1744/1744-h/1744-h.htm>
- Plato. (2008l). Symposium (B. Jowett, Ed.). Project Gutenberg .
<https://www.gutenberg.org/files/1600/1600-h/1600-h.htm>
- Plato. (2018). Republik (Sukur G. Sylvester, Ed.; pertama). PT. Buku Seru.
- Plato. (2020). Protagoras . Stanford University .
<https://plato.stanford.edu/entries/protagoras/>
- Plato. (2023). Cratylus. Dalam D. Meissner (Ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University.
<https://plato.stanford.edu/entries/plato-cratylus/>
- Plato. (2024). The Republic (B. Duignan, Ed.). Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/The-Republic>
- Pratama, A. (2024). Natural Law Theory.
- Rapar. J. H. (1991). Filsafat Politik Plato. CV. Rajawali Pers.
- Schmandt, H. (2009). Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D (Vol. 19). Alfabeta.
- Surajiyo. (t.t.). Refleksi Filosofis Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Universitas Indrapasara.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2020). Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum (F. Y. D. Siregar, T. Kemas, & N. Ibrahim, Ed.; 1 ed.). Kencana.

Umam, K. (2022). FILSAFAT UMUM: Sebuah Pengantar (Z. Abidin, Ed.; 1 ed.). DIVA Press.